

## PERHITUNGAN SELISIH PENDAPATAN DAN SEWA LAHAN HUTAN KEMIRI RAKYAT (HKR) DENGAN KONVERSINYA DI KABUPATEN MAROS

*Incomes and Rent Differential Calculation of Community Candlenut Forest (Hutan Kemiri Rakyat - HKR) and Its Conversion in Maros Regency*

Syamsu Alam

### Abstract

*This research was intended to measure the income differential of the farmer's incomes gained from the community candlenut forest (Hutan Kemiri Rakyat – HKR) and its conversion. The ratio of the farmer's incomes per ha/year between HKR and its conversion were: temporary farming (1: 3.42); permanent farming (1:4.84); and cocoa farming (1:3.42). Specifically, this study also investigated the differential of farmer's land rent incomes. The ratio of the farmer's land rent per ha/year between HKR and its conversion were: temporary farming (1: 2); permanent farming (1:3.98); and kakao farming (1:2.92). In absolute number, the differential of land rent were: temporary farming (Rp 982,816.25); permanent farming (5082263.96); and cocoa farming (1357202.3).*

**Keywords:** *hutan kemiri rakyat, income differential, conversion, maros*

### PENDAHULUAN

Menurut Prakosa (1996) bahwa upaya sektor kehutanan dalam mendukung sektor perekonomian yang berimbang dengan prinsip distribusi manfaat hutan antar generasi dan kelestarian sumberdaya hutan, maka tujuan pembangunan kehutanan jangka panjang, yaitu (1) meningkatkan pengelolaan tanah dan air, (2) meningkatkan produktivitas hutan dan pemasaran hasil hutan, (3) perlindungan flora dan fauna, dan (4) menyokong pembangunan sektor lainnya.

Perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari waktu ke waktu mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan hasil hutan, baik berupa kayu maupun non kayu termasuk jasa lingkungan. Kebutuhan kayu yang semakin meningkat sementara areal hutan alam yang semakin berkurang, sehingga diperlukan pengelolaan hutan yang tepat dalam memenuhi

kebutuhan kayu. Pada tahun 1999 kebutuhan kayu untuk industri mencapai 97,7 juta m<sup>3</sup>/tahun sementara kemampuan hutan alam hanya mampu menyediakan kayu 45,8 juta m<sup>3</sup>/tahun. Akibatnya terjadi kekurangan pasokan kayu sebesar 51,9 juta m<sup>3</sup>/tahun, yang menyebabkan tekanan terhadap hutan alam semakin besar (Kartodiharjo, 1999). Kekurangan pasokan kayu dari hutan alam tersebut mendorong terjadinya peningkatan permintaan kayu dari hutan rakyat.

Hutan Kemiri Rakyat (HKR) di Kabupaten Maros seluas 9.299 ha dengan rata-rata luas pemilikan petani 1.87 ha (62.54% dari total lahan yang dikuasai). Hutan rakyat tersebut tersebar di dalam kawasan hutan yaitu seluas 7.001 ha dan di luar kawasan hutan yaitu seluas 2.298 ha (Dinas Kehutanan Kabupaten Maros, 2005; Yusran, 2005; Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan, 2004 ). HKR tersebut mempunyai fungsi

perlindungan yang sangat penting bagi kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, karena sebahagian besar (96%) lokasinya terletak pada bagian hulu DAS sangat kritis yaitu DAS Bila-Walanae.

Khusus penelitian hutan rakyat di Sulawesi Selatan, telah diteliti beberapa aspek yaitu, (1) potensi kayu oleh Hamidin (1990) dan Murniati (1998), (2) pendapatan petani oleh Dassir (1989), Supratman (1994), dan Ansar (2001), (3) pemasaran oleh Anwar (2000) dan Ansar (2005), (4) kelembagaan masyarakat oleh Muspida (2002) dan Sinohadji (2004), (5) status lahan hubungannya dengan performansi ekonomi dan ekologi oleh Yusran (2005), (6) rente ekonomi hutan kemiri rakyat oleh Anwar (2006) dan (7) nilai manfaat hutan kemiri oleh Alif (2006).

Kecenderungan konversi areal hutan kemiri rakyat ke penggunaan non kehutanan, disebabkan oleh rendahnya nilai *land rent* yaitu pendapatan yang diterima petani dari balas jasa faktor produksi lahan dari hasil usaha HKR. Hal ini diperkuat dengan pendapat Barlow (1978) yang menyatakan bahwa pola penggunaan lahan ditentukan oleh besarnya *land rent* yang diterima dari suatu pola penggunaan lahan. Pola penggunaan lahan yang memberikan sewa lahan yang tinggi akan mengganti pola penggunaan lahan dengan sewa lahan yang rendah.

Nilai *land rent* (sewa lahan) rendah yang diterima petani dari HKR terjadi karena sewa yang diterima petani selama ini hanyalah sewa lahan yang berasal dari manfaat langsung (*tangible benefit*). Sedangkan nilai manfaat tidak langsung (*intangible benefit*) berupa jasa perlindungan lingkungan tidak diterima oleh petani. Sedangkan menurut Nugroho (2004) pengertian sewa lahan sesungguhnya adalah bermakna menyeluruh, yaitu balas

jasa dari lahan baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Mengalokasikan sewa lahan yang sesungguhnya meliputi nilai manfaat langsung dan tidak langsung akan dapat memotivasi petani melaksanakan melaksanakan pengelolaan HKR secara berkelanjutan.

Kebijakan tentang hutan rakyat, khususnya pada HKR yang ada saat ini belum mampu meningkatkan penerimaan sewa lahan petani HKR, sehingga petani tidak termotivasi untuk mempertahankan dan mengelola hutannya secara berkelanjutan, justru dirasakan oleh petani adanya kebijakan disinsentif terhadap pendapatan petani dari hasil hutan berupa kayu. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Anwar (2000) yang menemukan bahwa petani hutan rakyat tidak punya akses untuk mengurus perizinan dalam memanfaatkan kayu miliknya, sehingga mereka hanya menjual kepada pemilik Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) yang menyebabkan harga jual petani relatif rendah. Petani sebagai mahluk rasional cenderung untuk memilih dari berbagai alternatif yang ada. Dalam hal melakukan konversi atau tidak, petani juga akan melakukan pertimbangan rasional dengan memilih antara melakukan konversi atau tidak. Perbedaan diantara pilihan itu dari sisi pandang ekonomi sangat berarti guna menghitung pengorbanan petani jika tetap mempertahankan HKR.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan studi yang membandingkan biaya oportunitas petani, dalam hal ini selisih pendapatan konversi dengan HKR, guna memberikan gambaran seberapa besar pengorbanan petani jika tidak mengkonversi. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung selisih pendapatan dan sewa lahan

antara pendapatan/sewa lahan konversi dengan lahan HKR.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga kecamatan di Kabupaten Maros, ketiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Cenrana. Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian yaitu : (1) Lokasi penelitian tersebut merupakan wilayah yang didominasi hutan kemiri rakyat ,(2) Lokasi tersebut sedang berlangsung konversi hutan kemiri rakyat ke penggunaan lahan yang lain. Pengambilan data dilakukan di perkampungan (dusun) yang masih terdapat hutan kemiri rakyat. Pengumpulan data lapangan, analisa data dan penulisan disertasi dilakukan selama tiga (3) bulan yaitu mulai bulan Maret 2007 sampai Mei 2007.

### **Populasi dan Teknik Sampel**

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani yang terdapat pada ketiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Camba, Kecamatan Mallawa dan Kecamatan Cenrana. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa diwilayah ini didominasi hutan kemiri yang sedang terkonversi kepenggunaan lahan yang lain. Pengambilan sampel dilakukan secara acak distratifikasi (stratified random sampling). Yang pertama dilakukan adalah

pemilihan kampung-kampung sampel yang akan disurvei secara purposive yang didasarkan atas kriteria pola konversi HKR ke penggunaan ladang berpindah, ladang menetap dan kebun coklat. Dari 26 desa pada ketiga kecamatan tersebut terdapat sejumlah 92 kampung (dusun). Kampung-kampung tersebut dipilih 12 kampung secara purposive untuk masing – masing pola konversi HKR ke penggunaan lahan usaha tani lain. Sehingga terpilih sebanyak 36 kampung (dusun). Kemudian untuk masing-masing kampung dipilih secara acak petani responden sebanyak 10 orang. Dengan demikian jumlah responden untuk masing-masing pola konversi sebanyak 120 petani, sehingga total responden 360. Kampung – kampung yang terpilih sebagai sampel untuk masing-masing pola konversi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kampung-kampung Sampel okasi Penelitian

No	Desa	Kampung/Dusun	Pola Konversi	Jumlah Sampel
1	Cenrana	Aholiang	Ladang Berpindah	10
2	Cenrana	Panagi	Ladang Berpindah	10
3	Cenrana	Kajuara	Ladang Berpindah	10
4	Mattirodeceng	Madenge	Ladang Berpindah	10
5	Mariopulana	Bontomarannu	Ladang Berpindah	10
6	Sampatu	Lappatalle	Ladang Berpindah	10
7	Sampatu	Sampatu	Ladang Berpindah	10
8	Barugae	Balanglohe	Ladang Berpindah	10
9	Cenrana Baru	Arouke	Ladang Berpindah	10
10	Cenrana Baru	Malaka	Ladang Berpindah	10
11	Rompegading	Pattiro	Ladang Berpindah	10
12	Rompegading	Laniti	Ladang Berpindah	10
13	Pattirodeceng	Satoa	Ladang Menetap	10
14	Sawaru	Tajo	Ladang Menetap	10
15	Limampoccoe	Robo	Ladang Menetap	10
16	Limampoccoe	Jambua	Ladang Menetap	10
17	Laiya	Tanatakko	Ladang Menetap	10
18	Lebbotengae	Ma'lenreng	Ladang Menetap	10
19	Baji pamai	Parrang	Ladang Menetap	10
20	Cenrana Baru	Maccini	Ladang Menetap	10
21	Cempaniga	Tobonggae	Ladang Menetap	10
22	Cempaniga	Gattareng	Ladang Menetap	10
23	Sawaru	Campulili	Ladang Menetap	10
24	Samaenre	Bontosirig	Ladang Menetap	10
25	Mariopulana	Iappapai	Kebun Coklat	10
26	Padaelo	Passo	Kebun Coklat	10
27	Padaelo	Tojeppu	Kebun Coklat	10
28	Mattampa pole	Palacari	Kebun Coklat	10
29	Mattampa pole	Bulu-bulu	Kebun Coklat	10
30	Tellumpanuae	Jawi-jawi	Kebun Coklat	10
31	Bentengge	Reatoa	Kebun Coklat	10
32	Batu Putih	Lappailalang	Kebun Coklat	10
33	Barugae	Mamappang	Kebun Coklat	10
34	Barugae	Takehatu	Kebun Coklat	10
35	Mattampa pole	Jampue	Kebun Coklat	10
36	Batu Putih	Pangesoreng	Kebun Coklat	10
Jumlah				<b>360</b>

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007

## Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei, yaitu metode yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari responden. Beberapa metode yang digunakan adalah, Wawancara dan studi literatur. Metode wawancara dilakukan guna memperoleh data dan informasi langsung dari sumber aslinya tentang kondisi/parameter yang hendak dikaji dalam suatu kuesioner yang terstruktur dan tidak terstruktur, sedangkan studi literatur untuk memperoleh informasi pendukung guna melengkapi data yang ada.

## Analisis Data

Untuk menemukan nilai sewa lahan dan biaya oportunitas petani hutan kemiri rakyat digunakan analisis sebagai berikut :

### Analisis Usahatani

Analisis usahatani digunakan untuk mengetahui pendapatan petani dari usaha hutan kemiri rakyat dan pendapatan petani dari hasil usahatani konversi hutan kemiri. Rumus yang digunakan adalah:

$$Pd = TR - TC$$

dimana :

Pd = Pendapatan usahatani

TR = Total penerimaan

TC = Total biaya

dimana

$$TR = Y \times Py$$

TR = Total penerimaan

Y = Produksi

Py = Harga produk Y

$$TC = \sum_{i=1} X_i P_{xi}$$

$$i = 1$$

dimana :

TC = Total biaya

$X_i$  = Jumlah fisik dari input yang membentuk biaya

$P_{xi}$  = Harga input

n = Berbagai macam input

### Analisis Sewa Lahan

Analisis sewa lahan dilakukan untuk mengetahui nilai pendapatan dari faktor produksi lahan dengan pola usahatani kemiri dan nilai pendapatan dari faktor produksi lahan dengan pola usahatani konversi. Rumus yang digunakan adalah (Darusman, 1992):

$$LR = TR - TC (1 + a\%)$$

Dimana :

LR = Nilai sewa lahan

TR = Total Penerimaan

TC = Total Biaya

a% = Keuntungan normal (20%)

### Analisis Biaya Oportunitas

Petani Hutan kemiri rakyat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui nilai manfaat yang tidak diterima petani karena tetap mempertahankan lahannya sebagai hutan kemiri rakyat. Besarnya nilai biaya oportunitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$OC = LR_{NON HR} -$$

$$LR_{HR}$$

Dimana :

OC = Biaya oportunitas petani hutan kemiri rakyat

$LR_{NON HR}$  = Nilai sewa lahan usahatani konversi

$LR_{HR}$  = Nilai sewa lahan hutan kemiri rakyat

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perhitungan *land rent* dilakukan dua pendekatan, yaitu : perhitungan *Land rent* tanpa menghitung biaya tenaga kerja Sewa Lahan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya produksi ditambah keuntungan normal. Sehingga dalam perhitungan sewa lahan dalam tulisan ini adalah selisih penerimaan antara total biaya termasuk biaya tenaga kerja keluarga dan biaya faktor resiko petani (keuntungan normal).

keluarga (disebut menghitung pendapatan) dan dengan menghitung biaya tenaga kerja keluarga (disebut sewa lahan). Cara perhitungan yang digunakan untuk mengetahui sewa lahan telah dirinci lebih jauh lagi oleh Darusman (2002).

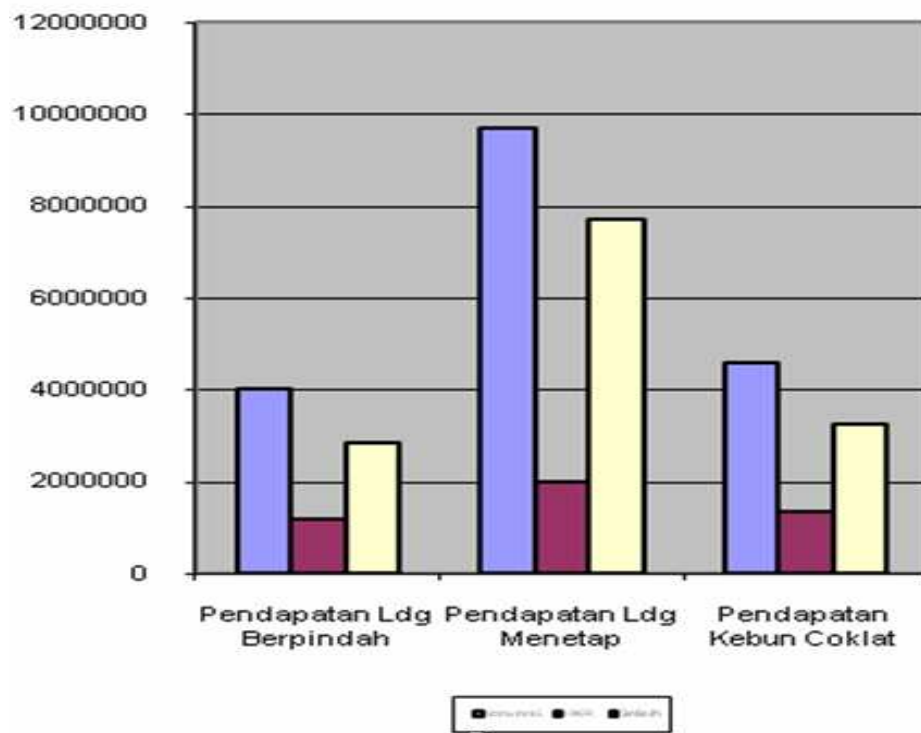
#### Pendapatan HKR

Perhitungan *land rent* dengan pendekatan rata-rata pendapatan perhektar pada masing-masing pola konversi HKR menjadi penggunaan lahan usahatani lain. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tabel 2. Pendapatan Rata – Rata Perhektar pada Masing-Masing Pola Konversi

No.	Pola Konversi	Pendapatan (Rp/ha/thn)			
		Pola Konversi	HKR Terkonversi	Selisih	Rasio
1	L. Berpindah	4012505	1172698	2839807	3.421601
2	L. Menetap	9683038	2000457	7682581	4.840413
3	Kebun Kakao	4594493	1344955	3249538	3.416094
4	Rerata	6096678.67	1506036.667	4590642	4.048161

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007



Gambar 1. Nilai Pendapatan HKR Perhektar Untuk Masing-Masing Pola Konversi

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 1 tersebut, menunjukkan angka nilai pendapatan usaha HKR lebih rendah daripada HKR terkonversi. Dengan demikian terdapat selisih yang cukup besar dan merupakan biaya oportunitas petani, karena tidak mengkonversi lahan hutan kemirinya.

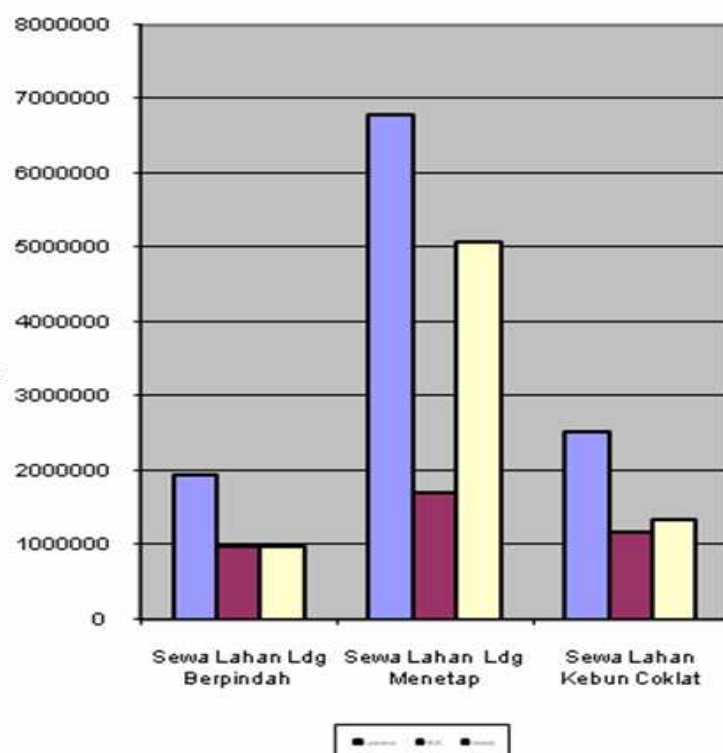
### Sewa Lahan HKR

Perhitungan Nilai sewa lahan (pendapatan dikurangi biaya tenaga kerja keluarga dan keuntungan petani). Khusus perhitungan biaya tenaga kerja dilakukan perhitungan berdasarkan serapan Hari Orang Kerja (HOK) setiap pola penggunaan lahan. Harga tenaga kerja keluarga digunakan harga ternaga kerja yang berlaku di kawasan HKR yaitu Rp 20.000 per HOK disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 2.

Tabel 3. Nilai Rata- Rata Sewa lahan Per hektar Berbagai Pola Konversi

No.	Pola Konversi	Pendapatan (Rp/ha/thn)			
		Pola Konversi			Pola Konversi
1	L. Berpindah	1962868	980052	982816	2.00282
2	L. Menetap	6788386	1706122	5082264	3.97884
3	Kebun Kakao	2540318	1182792	1357526	2.14773
4	Rerata	3763857	1289655	2474202	2.918499

Sumber : Data Primer Setelah Diolah,2007



Gambar 2. Nilai Sewa Lahan HKR Per hektar Untuk Masing-Masing Pola Konversi

Petani tidak dapat memisahkan pendapatan dari upah tenaga kerja keluarga mereka, keuntungan dan sewa lahan dari kegiatan usaha taninya, sehingga petani dalam mengambil keputusan dalam memilih alternatif penggunaan lahan sangat tergantung besarnya pendapatan yang diperolehnya.

### **Biaya Opportunitas Petani**

Perbedaan (selisih) sewa lahan antara lahan HKR dengan lahan HKR terkonversi ke penggunaan ladang berpindah sebesar Rp 982.816,25 ha/tahun, ladang menetap sebesar Rp 5.082.263,96 ha/tahun dan kebun kakao sebesar Rp 1.357.526,69 ha/tahun serta rata-rata semua pola konversi Rp 2.472.202,30. Sedangkan selisih pendapatan petani HKR untuk masing-masing pola konversi HKR ke penggunaan lahan, yaitu untuk penggunaan ladang berpindah sebesar Rp 1.313.893 ha/tahun, ladang menetap sebesar Rp5.950.255 ha/tahun dan Rp 2.676.542/ha/tahun.

Perbedaan (selisih) land rent (sewa lahan dan pendapatan) antara lahan HKR dan berbagai pola konversi penggunaan lahan menunjukkan besarnya nilai kesempatan atau keuntungan materi yang tidak dapat diperoleh oleh petani atas konsekwensinya untuk tetap mempertahankan lahan hutan kemirinya.

Perbandingan (rasio) sewa lahan dan pendapatan HKR antara

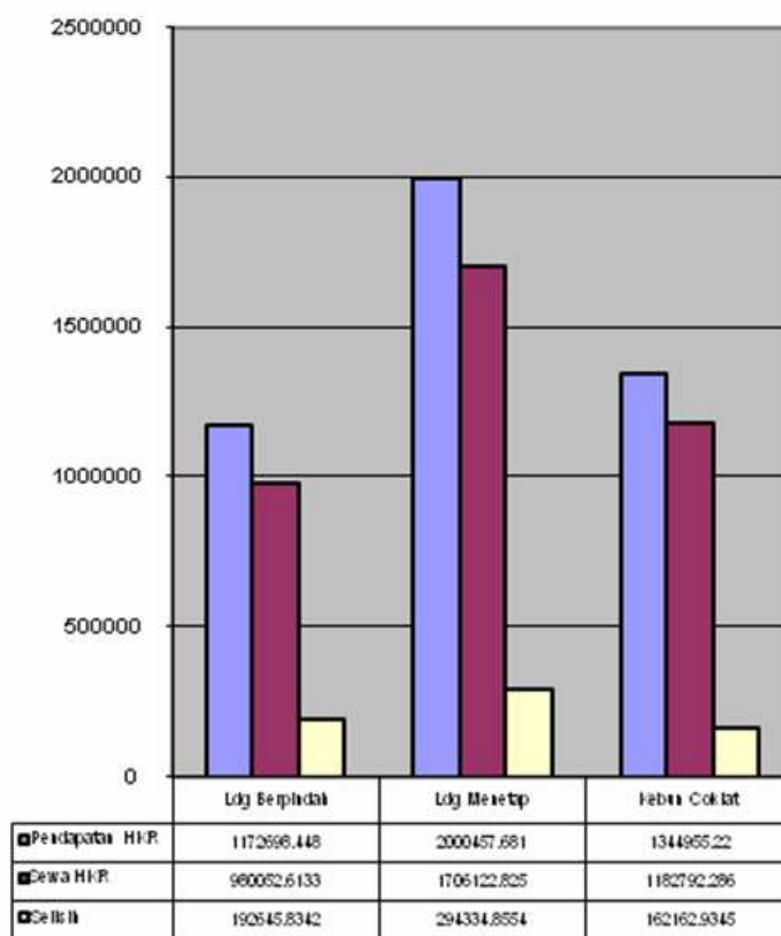
lahan HKR dan pola konversi penggunaan lahan disajikan pada Tabel 5 dan 6 diatas. Perbandingan sewa lahan antara HKR dan lahan pola konversi berbagai penggunaan lahan untuk penggunaan ladang berpindah sebesar 1 : 2,00, ladang menetap sebesar 1 : 3,98 dan kebun kakao sebesar 1 : 2,15 serta rata-rata untuk semua pola konversi 1 : 2,92. Sedangkan perbandingan pendapatan antara lahan HKR dan pola konversi penggunaan lahan untuk ladang berpindah 1 : 3,42, ladang menetap 1 : 4,84, dan kebun kakao 1 : 4,2 serta rata-rata 1 : 4,05

Nilai selisih (perbedaan) antara pendapatan dan sewa lahan untuk ladang berpindah Rp. 192.645,83 ha/tahun, ladang menetap Rp. 294.334,86 dan kebun coklat Rp 162.162,93. Perbedaan antara pendapatan dan sewa lahan HKR merupakan suatu jumlah yang tidak begitu besar, hal ini disebabkan usaha tani HKR tidak memerlukan tenaga kerja keluarga yang banyak, karena kegiatannya hanya kegiatan pemanenan.

Pada umumnya, semua pekerjaan dalam kegiatan usaha tani (budidaya, pemanenan dan pasca panen) dikerjakan sendiri oleh petani utama atau kepala keluarga atau bersama dengan anggota keluarga lainnya.

Hal ini disebabkan karena luas lahan yang mereka usahakan tidak begitu luas dan keterbatasan biaya untuk mengupah tenaga kerja luar keluarga.

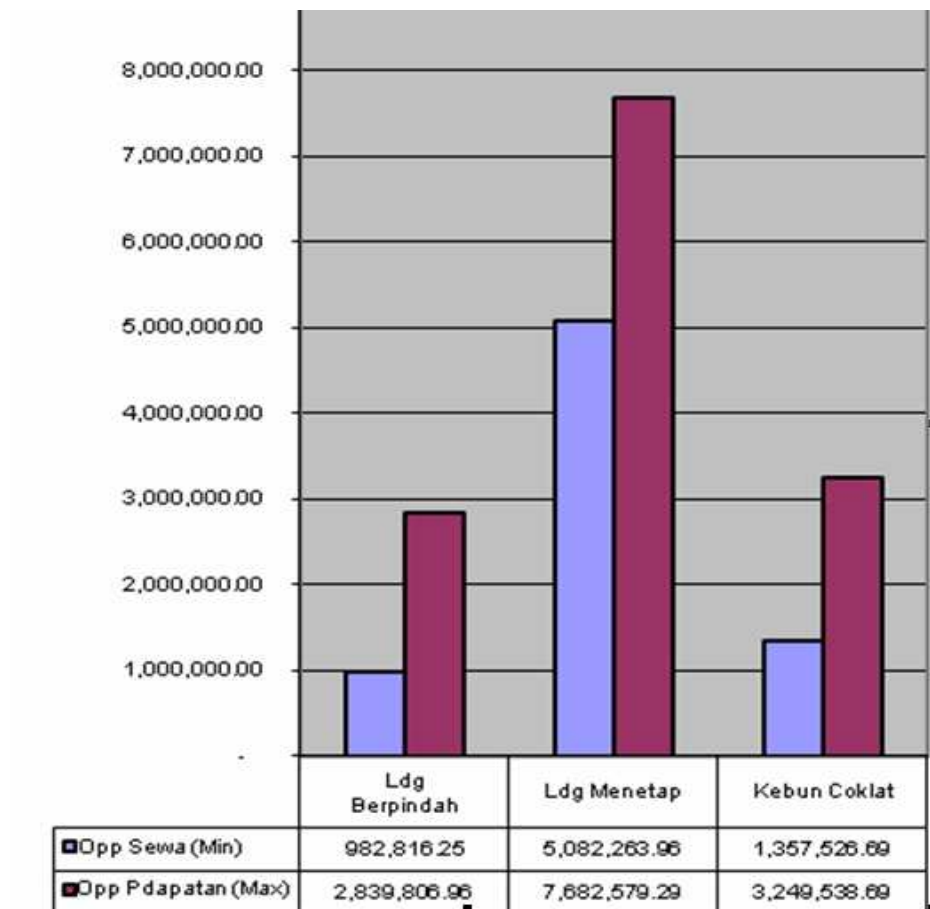




Gambar 3. Nilai Pendapatan Sewa Perhektar Untuk Masing-Masing Pola Konversi

Nilai *opportunity cost* (biaya oportunitas) petani yang diperoleh dari selisih nilai land rent antara HKR dan lahan HKR yang terkonversi memperlihatkan angka yang sangat besar baik dari pendekatan perhitungan sewa lahan maupun dari perhitungan pendapatan. Biaya oportunitas petani pola konversi ladang berpindah nilai minimal (tanpa menghitung biaya tenaga kerja keluarga dan faktor resiko) sebesar Rp 982.816,25 ha/tahun dan nilai maksimal (menghitung biaya tenaga kerja keluarga dan faktor

resiko) sebesar Rp 2.839.806,96 ha/tahun. Pola konversi ladang menetap nilai minimal Rp 5.082.263,96 ha/tahun dan maksimum 7.682.579,29 ha/tahun. Untuk pola konversi kebun kakao minimal Rp 1.357.526,69 ha/tahun. Perbandingan nilai biaya oportunitas minimal antara pola konversi ladang berpindah dengan pola ladang menetap 1: 5,70 dan kebun kakao 1: 1,38. Sedangkan nilai biaya oportunitas minimal antara ladang menetap dengan kebun kakao 1: 3,74.



Gambar 4. Selisih Opportunities Pendapatan dan Sewa Perhektar

## KESIMPULAN

Nilai land rent dengan pendekatan perhitungan sewa lahan perhektar dan pendapatan perhektar menunjukkan perbedaan yang besar antara lahan HKR dengan berbagai pola konversi penggunaan lahan.

Perbandingan selisih (perbedaan) antara sewa lahan HKR dengan Pola konversi ladang berpindah 1 : 2,00; ladang menetap 1 : 3,98; dan kebun kakao 1 : 2,92. Sedangkan perbandingan selisih pendapatan HKR dengan pola konversi ladang berpindah 1 : 3,42, ladang menetap 1 : 4,84 dan kebun kakao 1 : 3,42. Rendahnya nilai *land rent* (sewa lahan dan

pendapatan) HKR dan tingginya perbedaan alternatif pola penggunaan lahan usaha tani yang lain adalah merupakan masalah yang sangat serius dalam pengelolaan HKR berkelanjutan. Perbedaan *land rent* antara pola penggunaan lahan usaha tani dengan lahan HKR merupakan biaya oportunitas petani. Karena adanya kesempatan petani untuk memperoleh land rent yang lebih besar jika mereka mengkonversi hutan kemirinya, dengan tidak mengkonversi hutan kemirinya, maka petani tidak memperoleh land rent tersebut.

Untuk mempertahankan keberlanjutan nilai manfaat baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung HKR di Kabupaten

Maros diperlukan peningkatan nilai *land rent* HKR minimal sama dengan alternatif pola konversi penggunaan lahan. Besarnya perbedaan *land rent* antar berbagai pola penggunaan lahan usaha tani dapat dijadikan dasar untuk memperhitungkan sewa lingkungan (environmental rent) hutan kemiri rakyat yang harus diterima kepada petani sebagai pengelola HKR.

Besarnya biaya oportunitas petani dengan pendekatan perhitungan sewa lahan, yaitu untuk pola konversi ladang berpindah sebesar Rp 982.816,25 /ha/tahun, ladang menetap Rp 5.082.263,96/ha/tahun dan kebun kakao Rp 1.357.202,30 /ha/tahun serta rata – rata untuk semua pola konversi penggunaan lahan sebesar Rp 2.474.202,30.

Salah satu kebijakan yang bisa diambil dengan mempertimbangkan selisih pendapatan dan sewa lahan tersebut adalah dengan memberikan subsidi langsung kepada petani. Subsidi tersebut dibedakan atas tiga kategori konversi, dimana subsidi minimumnya adalah selisih dari sewa lahan, sementara subsidi maksimumnya adalah selisih dari pendapatan. Dengan demikian, petani bisa mendapatkan kompensasi agar mempertahankan HKR.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. 2000. *Studi Pemasaran Kayu Jati (Tectona grandis L) Hasil Hutan Rakyat di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Barlow, R. 1978. *Land Resources Economic*. 3<sup>rd</sup> Edition.
- Prentice Hall, Inc., Engelwood Cliffs: New Jersey.
- Darusman, D. 2002. *Pembenahan Kehutanan Indonesia*. Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Dassir. 1989. *Analisis Finansial Usahatani Kemiri di Kecamatan Camba*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (tidak dipublikasikan). Makassar.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Maros, 2005, *Laporan tahunan Maros*, Maros
- Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2005. *Data dan Informasi (Statistik) Tahun 2004*. Makassar
- Nugroho, I dan Dahuri, R. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. LP3ES: Jakarta.
- Supratman. 1994. *Pengelolaan Hutan Jati Rakyat di Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Desa Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Madya Pare-Pare)*. Skripsi Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (tidak dipublikasikan). Makassar.
- Yusran, 2005. *Analisis Performansi dan Pengembangan Hutan Kemiri Rakyat di Kawasan Pegunungan Bulusaraung Sulawesi Selatan*. Disertasi tidak diterbitkan. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Diterima : 25 Juli 2007

**Syamsu Alam**

Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan,  
Fakultas Kehutanan,  
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telp./Fax. 0411-585917 Indonesia